



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran XXVIII

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



KECAMATAN ARGOMULYO



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 273 / 2026

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan
b. Bab IV : Penutup.

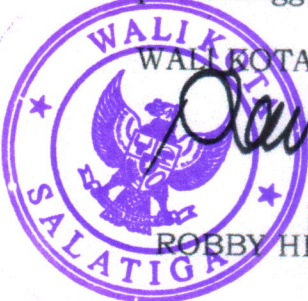
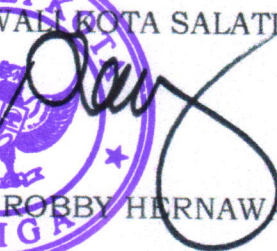


- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.



- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2026


WALIKOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



DAFTAR ISI

Daftar isi	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	7
KECAMATAN ARGOMULYO TAHUN 2025	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Argomulyo Tahun 2025	7
2.1.1. Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Tahun 2025	7
2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra tahun 2025	12
2.1.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Argomulyo	22
2.2. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal	25
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Argomulyo	26
2.3.1. Review Terhadap RKPD	38
2.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD	48
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
2.6. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	65
BAB III	69
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ARGOMULYO	69
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi	71
3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo	72
3.4. Arah Kebijakan	76
BAB IV	78
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ARGOMULYO	78

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	79
4.2. Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Kebijakan Tematik	83
BAB V	85
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	85
5.1. Indikator Kinerja Utama	85
5.2. Indikator Kinerja Kunci	87
BAB VI	89
PENUTUP	89
6.1. Kesimpulan Substansi	89
6.2. Kaidah Pelaksanaan	89
6.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Argomulyo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2025	14
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga	24
Tabel 2. 3 Review terhadap RKPD Tahun 2027	39
Tabel 2. 4 Data Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD	50
Tabel 2. 5 Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Wilayah Tahun 2027	57
Tabel 3. 1 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional 71	
Tabel 3. 2 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Prioritas Provinsi	72
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	74
Tabel 3. 4 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Prioritas dan Kota	76
Tabel 3. 5 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan	77
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Argomulyo Tahun 2027	81
Tabel 4. 2 Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Kebijakan Tematik	84
Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Argomulyo	86
Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran serta masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

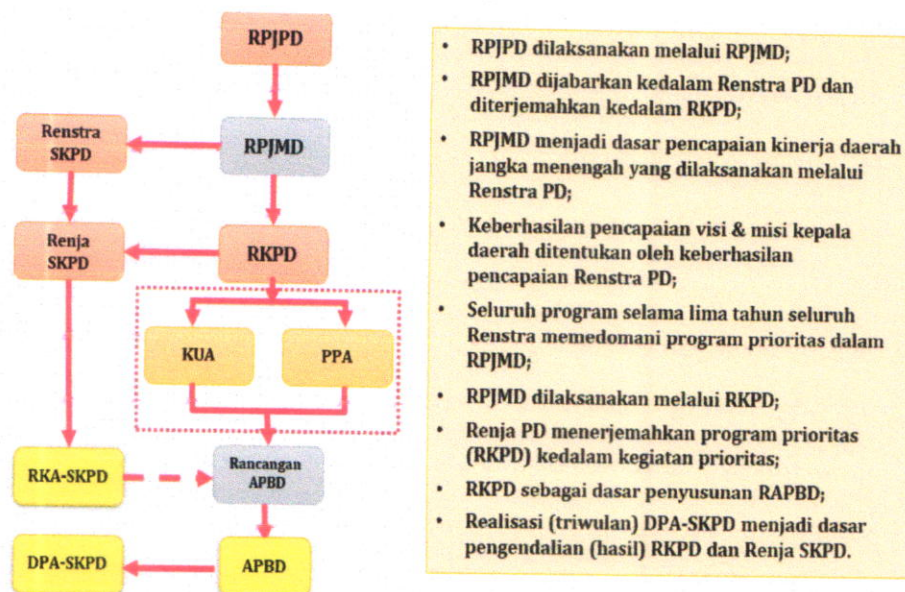
Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah

sebagai persiapan penyusunan Renja Perangkat daerah dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja PD tahun sebelumnya dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo tahun berjalan.

Rencana Kerja Tahun 2027 Kecamatan Argomulyo adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Argomulyo Tahun 2025-2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah :



Adapun fungsi dari Rencana Kerja tersebut adalah :

1. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Argomulyo.

2. Merupakan indikator dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat sebagai adalah satu unsur potensi sumber daya masyarakat secara efektif, efisien.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Tahun 2027 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo dimaksudkan untuk :

1. Memberi kerangka arah pembangunan dalam mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program serta sebagai indikator dan tolok ukur kinerja Kecamatan Argomulyo.
2. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Argomulyo.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi Kecamatan Argomulyo yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;
- 3) Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I memuat uraian mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2027.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Argomulyo Tahun Lalu

Bab II memuat uraian Evaluasi Capaian Kinerja, Evaluasi Capaian SPM, Permasalahan Isu Strategis, Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD, Telaah Usulan Masyarakat dan Inovasi dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Argomulyo

Bab III memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo serta Arah Kebijakan

- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Argomulyo
Bab IV memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Argomulyo yang ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Dukungan Program dan Kegiatan terhadap kebijakan tematik
- Bab V Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Bidang Urusan
Bab V memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Argomulyo Tahun 2025 serta Indikator Kinerja Kunci
- Bab VI Penutup
Bab VI memuat kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN ARGOMULYO TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Argomulyo Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Argomulyo sampai dengan Tahun 2025 merupakan bagian dari proses pengendalian dan pemantauan pembangunan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana program kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.

2.1.1. Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Tahun 2025

Tahun 2025, Kecamatan Argomulyo melaksanakan 5 (lima) program yang terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi Program sampai dengan Tahun 2025 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada rencana kerja:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, realisasi anggaran 100% dan realisasi fisik sebesar 100%

- 2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 89,18% dan realisasi fisik sebesar 99,75%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi anggaran sebesar 89,07% dan realisasi fisik sebesar 98,72%.
- Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, realisasi anggaran 99,89% dan realisasi fisik sebesar 100%.

- 3) Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 16,63% dan realisasi fisik sebesar 16,67%.

Sub Kegiatan :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, realisasi anggaran sebesar 16,63% dan realisasi fisik sebesar 16,67%.

- 4) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi anggaran sebesar 87,32% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar 98,86% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi anggaran sebesar 93,47% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi anggaran sebesar 94,92% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi anggaran sebesar 79,18% dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan, realisasi anggaran sebesar 97,17% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu, realisasi anggaran sebesar 41,87% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi anggaran sebesar 86,24% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 5) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi anggaran 92,19% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi anggaran 92,19% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 6) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi anggaran 83,66% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar 82,80% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi anggaran sebesar 96,50% dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi anggaran sebesar 83,26% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 7) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi anggaran 85,86% dan realisasi fisik sebesar 99,44%.
- Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi anggaran sebesar 50,38% dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, realisasi anggaran sebesar 69,77% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, realisasi anggaran sebesar 98,15% dan realisasi fisik sebesar 98,85%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi anggaran sebesar 88,67% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi anggaran sebesar 99,07% dan realisasi fisik sebesar 100%.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan realisasi anggaran 95,72% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, realisasi anggaran sebesar 95,72% dan realisasi fisik sebesar 100%

- 2) Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan realisasi anggaran 92,01% dan realisasi fisik 100%

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, realisasi

anggaran sebesar 92,01% dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, realisasi anggaran sebesar 95,00% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, realisasi 95,00% dan realisasi fisik sebesar 100%.

- 2) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, realisasi anggaran sebesar 93,60% dan realisasi fisik sebesar 97,28%

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, realisasi anggaran sebesar 93,60% realisasi fisik sebesar 97,28%
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, realisasi anggaran sebesar 97,45% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, realisasi anggaran sebesar 98,05% dan realisasi fisik sebesar 100%.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- 1) Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, realisasi anggaran sebesar 71,23% dan realisasi fisik sebesar 97,81%

Sub Kergiatan :

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordiansi Pimpinan di Kecamatan realisasi anggaran sebesar 71,23% dan realisasi fisik sebesar 97,81%.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- 1) Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, realisasi anggaran sebesar 93,81% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset, realisasi anggaran sebesar 93,81% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi Anggaran pada Kecamatan Argomulyo sampai dengan Tahun 2025 sebesar 91,98% dan realisasi fisik sebesar 99,61% dengan rincian sebagai berikut :

Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (%)	Fisik (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.378.443.270	9.190.249.438	88,55	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	126.416.000	119.061.639	94,18	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.439.636.000	4.864.453.127	75,54	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.000.000	22.792.875	71,23	97,81
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	115.000.000	107.878.900	93,81	100
Jumlah	17.320.996.070	15.932.055.788	91,98	99,61

2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Argomulyo. Evaluasi ini juga menjadikan dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Argomulyo serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan Pembangunan pada tahun berikutnya.

Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh meningkatnya koordinasi lintas sektor, komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, partisipasi aktif kelurahan dan masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pelaksanaan Renstra Kecamatan telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan di wilayah kecamatan.

Untuk capaian Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 pada dilihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Rekapitulaasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Argomuluo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2025

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Argomulyo dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Argomulyo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2025			Target Program dan Kegiatan Renja 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
										Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)* 100	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/4) *100
7	0				Unsur Kewilayahan										
7	0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
						Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	90,00	85,26	86,00	90,56	105,30	86,00	261,82	290,91
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	73,04	73,00	73,00	73,60	100,82	73,00	219,60	300,66

7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	96,79	100,00	100,00	100,00	100,00	296,79	296,79
7	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	9	9	9	100,00	9	27,00	300,00
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
7	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	65	72	60	63	105,00	63	198,00	304,62
7	01	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	100,00	1	3,00	300,00
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	%	100,00	0,00	100,00	59,98	59,98	100,00	159,98	159,98
7	01	01	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	3	2	66,67	2	6	300,00

7	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00
7	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	paket								
7	01	01	2.05	09		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang								
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	15	12	15	15	100,00	15	42	280,00
7	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	20	20	20	20	100,00	20	20	100,00
7	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	40	10	40	40	100,00	40	90	225,00
7	01	01	2.06	05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	10	4	4	100,00	4	18	450,00
7	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Paket	2	2	2	2	100,00	2	6	300,00
7	01	01	2.06	08	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	10	1	1	100,00	1	12	1200,00

7	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	20	20	20	100,00	12	52	433,33
7	01	01	2.06		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pad SKPS	Dokumen	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100,00	0	200	200,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan									
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	10	4	4	100,00	4	18	450,00
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	300	300,00
7	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2	2	2	100,00	2	6	300,00
7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	7	7	12	12	100,00	12	31	442,86

7	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan								
7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0	1	1	1	100,00	0	2	#DIV/0!
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300	300,00
7	01	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
7	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	58	45	45	45	100,00	58	148	255,17
7	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Unit	7	1	5	5	100,00	7	13	185,71

7	01	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	Unit	6	15	15	15	100,00	6	36	600,00
7	01	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat penncapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	93,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	80,00	80	86,02
7	01	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300	300,00
7	01	01	2.01	02	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	10	2	2	2	100,00	10	14	140,00
7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	%	100,00	102,46	84,00	96,96	115,43	86,00	285	285,42

7	01	01	2.02	03	Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	2	2	2	2	100,00	2	6	300,00
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Peencanaan Kelurahan	%	55,00	97,82	45,00	100,00	222,22	60,05	258	468,85
7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100,00	98,51	61,00	99,19	162,61	61,05	259	258,75
7	01	03	2.01	03	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	10	7	7	7	100,00	10	24	240,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	%	100,00	97,82	45,00	100,00	222,22	50,00	248	247,82
7	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	6	6	100,00	6	18	300,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan dan Kelurahan	unit	96	54	82	82	0,00	72	208	216,67

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ ormas	6	6	6	6	100,00	6	18	300,00
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terlaksananya kegiatan forum koordinasi pimpinan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300	300,00
7	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan forum koordinasi pimpinan kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300	300,00
7	01	05	2.01	08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian SPPT PBB ke Wajib Pajak	%	79,00	100,00	73,35	60,76	82,84	75,00	236	298,43
7	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300	300,00
7	01	06	2.01	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Dokumen	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00

2.1.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Argomulyo

Berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara berkala antara lain rapat koordinasi secara rutin yang meliputi bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban, pembangunan dan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral. Untuk meningkatkan kualitas aparatur telah dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur.

Dalam hal pelayanan publik Kecamatan Argomulyo telah melakukan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, melakukan pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat serta pelayanan konsultasi.

Selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, Kecamatan Argomulyo berupaya memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kemampuan, kemandirian masyarakat dan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya politik dan lingkungan hidup melalui penguatan lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Strategi yang digunakan dalam rangka penyusunan konsep perencanaan pembangunan yang merupakan sumber aspirasi dan keinginan masyarakat dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai

dasar pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Argomulyo.

Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Argomulyo, dengan menerapkan Indikator Kinerja Utama yang baru. Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Argomulyo berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
2. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan.
3. Persentase Capaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Fungsi Penunjang Kecamatan Argomulyo Tahun 2025 adalah

1. Persentase kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan tahun 2025, berdasarkan Renstra 2025-2029 target yang ditetapkan 75% realisasinya 82,08% dengan demikian realisasi tahun 2025 telah memenuhi target.
2. Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan target tahun 2025 ditetapkan 75% realisasi 83,38% dengan demikian realisasi tahun 2025 telah memenuhi target.
3. Persentase capaian akuntabilitas pemerintah kecamatan, berdasarkan Renstra 2025-2029 target yang ditetapkan 75% realisasi 88,05%

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Argomulyo dapat dilihat dalam Tabel 2.2

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga

No.	Indikator	SPM	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan		%	75,00	76,00	77,00	78,00	82,08		77,00	78,00	
2	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan		%	75,00	76,00	77,00	78,00	83,38		77,00	78,00	
3	Persentase Capaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan		%	75,00	76,00	77,00	78,00	88,05		77,00	78,00	

2.2. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal

Pada periode Tahun 2023–2025, Kecamatan Argomulyo tidak memiliki target maupun indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Argomulyo bukan merupakan perangkat daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi objek penerapan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tidak terdapat capaian SPM yang dapat diukur, dievaluasi, maupun dibandingkan pada tingkat Kecamatan selama periode tersebut. Seluruh indikator SPM menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Meskipun tidak memiliki SPM, Kecamatan Argomulyo tetap berperan dalam mendukung pencapaian target SPM melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di wilayah kecamatan. Dukungan tersebut antara lain berupa fasilitasi koordinasi lintas sektor, penyampaian informasi kepada pemerintah desa/kelurahan, pendampingan pelaksanaan program pelayanan dasar, serta pelaporan kondisi dan kebutuhan masyarakat kepada perangkat daerah yang berwenang.

Oleh karena itu, evaluasi capaian SPM pada Kecamatan Argomulyo dinyatakan tidak dapat dilakukan (tidak relevan) karena tidak terdapat kewenangan, target, maupun indikator SPM yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Argomulyo. Evaluasi kinerja Kecamatan Argomulyo lebih tepat didasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Argomulyo

Kecamatan Argomulyo sebagai penyelenggara pemerintahan umum dan pemberi pelayanan public berada pada posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah dan transparan, kinerja pelayanan kecamatan menghadapi isu strategis dan hal penting yang menentukan efektivitas pelayanan tersebut.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan administrasi secara umum sudah berjalan namun masih ada hambatan pada pengelolaan data yang belum sepenuhnya digital dan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi teknis memadai.

Aksesibilitas pelayanan di kecamatan relative mudah dijangkau, tetapi masih terdapat kesenjangan akses bagi masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas. Efektivitas koordinasi dengan kelurahan yang mana kecamatan dengan kinerja pembinaan dan pengawasan kepada kelurahan akan tetapi ada permasalahan yang muncul yaitu ketidakterpaduan data antara kecamatan dan kelurahan, kesenjangan pemahaman regulasi dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam program Pembangunan.

2. Hal-hal Kritis yang berpengaruh terhadap pelayanan kecamatan

a. Kapasitas SDM Aparatur

Kualitas dan jumlah SDM merupakan factor paling menentukan dalam keberhasilan pelayanan kecamatan. Masalah kritis meliputi:

- Keterbatasan pegawai pada bidang teknis dan pelayanan;
- Beban kerja yang tidak sebanding;
- Kebutuhan kompetensi baru seperti digitalisasi, administrasi modern dan layanan public berbasis standar mutu.

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Ketersediaan sarana pendukung:

- Ruang pelayanan yang representatif;
- Peralatan computer dan jaringan internet
- Ruang tunggu yang layak

c. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Layanan

Digitalisasi merupakan kebutuhan mendesak, banyak layanan masih dilakukan secara manual sehingga layanan lebih lambat, potensi kesalahan administrasi lebih tinggi dan validasi sinkronisasi data antar OPD tidak optimal. Belum adanya sistem terpadu antara kecamatan, kelurahan dan OPD menyebabkan pelayanan menjadi tidak sama.

d. Keterbatasan Anggaran

Kecamatan memiliki anggaran yang terbatas untuk inovasi pelayanan public dan efisiensi anggaran masih berlaku sehingga ruang untuk pembaruan sistem, peningkatan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan relative kecil.

e. Dinamika Masalah Sosial Masyarakat

Sebagai wilayah terdekat dengan masyarakat kecamatan menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, sengketa tanah, pelayanan sosial dasar yang semuanya membutuhkan kehadiran kecamatan namun tidak selalu didukung kewenangan yang memadai

Secara keseluruhan pelayanan kecamatan berfokus pada tantangan dalam kapasitas SDM, sarana prasarana, kelembagaan, digitalisasi layanan dan dinamika sosial masyarakat. Hal-hal kritis sangat menentukan kualitas dan kecepatan pelayanan kecamatan serta faktor kunci dalam upaya:

- Meningkatkan kepuasan masyarakat.
- Menjamin kepastian layanan public
- Mendukung visi misi kepala daerah
- Memenuhi standar nasional seperti NSPK, SPM dan SDGs

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah kota. Adapun permasalahan dan hambatan tersebut adalah

1. Keterbatasan SDM

Kemampuan dan kompetensi aparatur mempengaruhi kualitas pelayanan dan pembinaan di wilayah dan mutasi/rotasi pegawai yang menyebabkan cepat menyebabkan kurangnya kontinuitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

3. Keterbatasan Anggaran

Ketergantungan pada alokasi dari pemerintah daerah menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan ketersediaan anggaran.

4. Tantangan Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi dengan OPD, Kelurahan masing sering menghadapi hambatan dalam sinkronisasi data, pelaporan maupun pelaksanaan kebijakan.

Kurang integrasi program yang menyebabkan beberapa kegiatan berjalan tumpang tindih dan kurang efektif.

5. Keterbatasan Kewenangan Kecamatan

Sebagian besar urusan strategis tetap berada pada OPD sehingga kecamatan hanya berperan sebagai fasilitator.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional :

a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pelayanan kecamatan yang lebih cepat, akuntabel dan transparan memperkuat komitmen kepala daerah dalam menghadirkan pemerintah yang professional dan berintegritas.

Digitalisasi layanan, perbaikan prosedur dan peningkatan kapasitas aparatur mendukung realisasi visi kepala daerah untuk membangun birokrasi yang baik.

b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Layanan lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat/public.

c. Mendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah.

Koordinasi kecamatan dengan kelurahan mempercepat pemerataan Pembangunan hingga tingkat bawah.

d. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Pengentasan Kemiskinan

Pelayanan yang baik mendukung kelancaran program pemberdayaan masyarakat pengembangan UMKM dan mendukung misi kepala daerah dalam mewujudkan ekonomi daerah yang maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pelayanan public, pembinaan kelurahan dan koordinasi pemerintahan menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

A. Tantangan

1. Keterbatasan SDM

- Jumlah dan kompetensi aparaturnya belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan yang semakin beragam dan kompleks.
- Beban kerja tinggi yang tidak sebanding

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan

- Fasilitas pelayanan di kantor belum sepenuhnya sesuai standar.
- Peralatan kerja dan dukungan teknologi informasi belum optimal untuk mendukung pelayanan cepat dan terintegrasi.
- Akses jaringan internet yang masih terbatas

3. Keterbatasan Anggaran

Ketergantungan pada alokasi dari pemerintah daerah menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dan ketersediaan anggaran.

B. Peluang

1. Kemajuan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pelayanan.

- Pengembangan layanan digital dapat mempercepat layanan kecamatan.
- Integrasi sistem data antar OPD membuka peluang pelayanan lebih efektif, transparan dan efisiensi.

2. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah.

- Pemerintah pusat dan daerah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui SPM, NSPK dan Kebijakan reformasi birokrasi.

3. Tingginya Kebutuhan dan Harapan Masyarakat.

- Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan cepat, mudah dan transparan menjadi peluang untuk memperbaiki sistem dan inovasi layanan baru.

- Masyarakat semakin sadar pentingnya layanan public yang berkualitas.
4. Potensi Inovasi Pelayanan Kecamatan.
- Implementasi pelayanan berbasis inklusi sosial dapat menjangkau kelompok rentan (lansia, disabilitas).
5. Pemanfaatan Aset dan Sumber Daya Wilayah
- Aset kelurahan dan potensi ekonomi local dapat mendukung pembiayaan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Kolaborasi dengan pihak swasta, BUMD atau CSR membuka peluang peningkatan fasilitas layanan.

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kecamatan menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan, kecamatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan public. Melalui optimalisasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat, kecamatan dapat menyelenggarakan pelayanan yang responsive, efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hingga saat ini Kecamatan Argomulyo belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menjalan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik selalu melaksanakan prinsip pelibatan Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis (*Strategic Vision*).

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di kecamatan/kelurahan.

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan Kecamatan Argomulyo di atas dan diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus di kecamatan yaitu “Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Kecamatan”

Dalam rangka mencari dan menentukan nilai isu strategis yang melekat pada unit organisasi Kecamatan Argomulyo maka di analisis factor internal organisasi meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), dan faktor eksternal organisasi meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Instrumen-instrumen tersebut juga sangat mempengaruhi bagi dinamika organisasi, baik secara intern maupun ekstern yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

Kecamatan Argomulyo dalam rangka mencapai tujuan organisasi memiliki kekuatan yang dapat mendorong dan menopang organisasi dalam meningkatkan kinerja. Adapun kekuatan tersebut antara lain :

- 1) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepada Camat;
- 2) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- 3) Dengan terisinya jabatan struktural di Kecamatan Argomulyo diharapkan akan terjadi pembagian tugas (*job description*) dan akan menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan wewenang tugas, sehingga efisiensi dan efektifitas akan tercapai;
- 4) Adanya pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan yang diadakan secara rutin setiap bulannya merupakan sarana komunikasi dan penyampaian informasi antar lintas sektor dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Adanya jalinan kerja sama dengan tokoh-tokoh informal masyarakat akan membantu pelaksanaan penyampaian informasi atau kebijakan pemerintah tingkat atas dan akan mempermudah atau mempercepat penyelesaian permasalahan yang muncul dari tingkat bawah;
- 6) Dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Pra Musrenbang di tingkat RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan yang selanjutnya akan di bawa ke tingkat kota akan dapat menyerap aspirasi dari tingkat bawah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan maupun pembangunan (*bottom up planning*);
- 7) Alokasi APBD pada Kecamatan Argomulyo merupakan kekuatan untuk dapat terselenggaranya operasional seluruh kegiatan pemerintahan Kecamatan Argomulyo.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang ada di Kecamatan Argomulyo merupakan faktor yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk meminimalisir ataupun menutup kelemahan tersebut yang ada antara lain :

- 1) Tidak seimbangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan beban tugas yang harus diselesaikan, beban tugas yang banyak tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas pegawai. Kekurangan pegawai yang terlatih dan berkualitas dalam hal ini tentu saja akan mempengaruhi pelaksanaan tugas yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Masih adanya kurang inisiatif dan kreatifitas pegawai/staf dalam menyelesaikan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga masih adanya ketergantungan pegawai/staf terhadap atasannya. Hal ini terbukti dengan masih adanya pegawai yang menunggu tugas dan petunjuk dari atasannya tanpa ada ide untuk menjabarkan tugas pokoknya.
- 3) Masih adanya kekurangan infrastruktur dan teknologi untuk mendukung pelayanan public, seperti system layanan berbasis teknologi informasi (IT) yang belum berkembang.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Faktor Eksternal organisasi mempunyai peluang yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan antara lain :

- 1) Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan merupakan peluang bagi tercapai tujuan dan suksesnya program kegiatan yang telah direncanakan;
- 2) Keberadaan LPMK dan Lembaga Kemasyarakatan yang lain di samping sebagai mitra kerja juga dapat sebagai fungsi kontrol dalam merencanakan dan menjalankan seluruh program kegiatan kecamatan;
- 3) Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dapat menjadi pendorong bagi pemerintah

untuk meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat agar senantiasa memberikan kepuasan bagi masyarakat dan keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan Pembangunan dalam segala bentuk baik Pembangunan fisik maupun mental spritual;

- 4) Dengan dilaksanakannya program kegiatan pembangunan oleh pemerintah di wilayah Kecamatan Argomulyo merupakan peluang sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan menyejahterakan masyarakat.

b. Ancaman (*Threats*)

Selain sebagai peluang faktor-faktor eksternal akan dapat menjadi ancaman bagi unit organisasi Kecamatan Argomulyo yang harus diatasi antara lain :

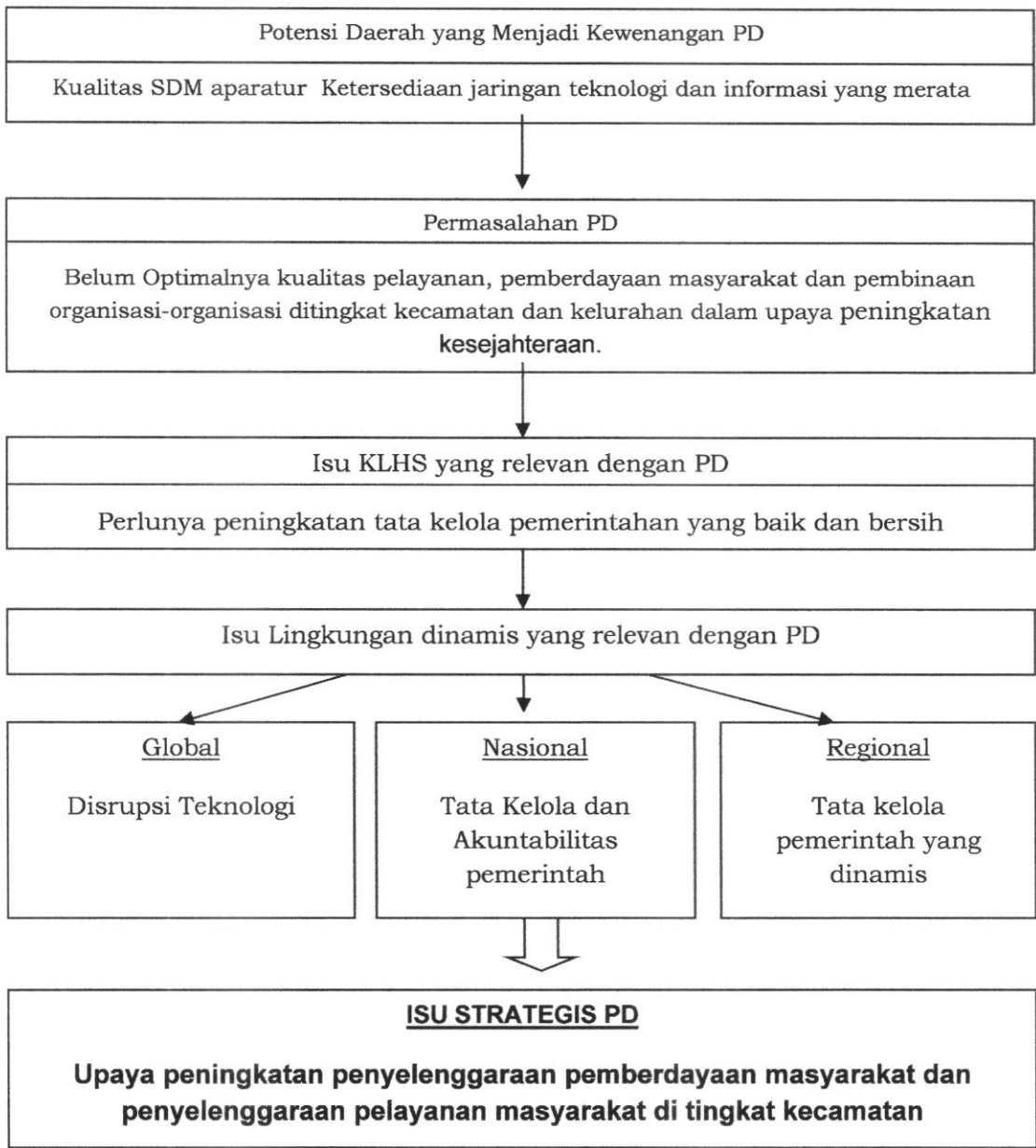
- 1) Pemenuhan sarana prasarana di kecamatan/kelurahan yang kurang lengkap akan menjadi kendala tersendiri dalam proses pelayanan masyarakat;
- 2) Adanya kecenderungan dari sebagian masyarakat yang menggantungkan bantuan dari pemerintah sehingga tidak berusaha untuk mandiri. Bantuan yang seharusnya sebagai perangsang untuk dapat mandiri ternyata disalah persepsikan sebagai bantuan yang terus menerus;
- 3) Adanya usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat yang direncanakan lewat musrenbang tidak dapat direalisasikan semuanya karena keterbatasan anggaran APBD, hal ini apabila tidak mendapat perhatian akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan menjadi preseden buruk bagi pemerintah;

- 4) Masih ada beberapa kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya kurang terencana/terkoordinasi dengan baik, sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan ataupun hasil pembangunan yang kurang baik/tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat/bahkan sudah rusak sebelum dipergunakan.

Berdasarkan pada situasi, kondisi dan permasalahan dan hambatan Kecamatan Argomulyo diatas dan diselaraskan dengan prioritas peningkatan pelayanan prima di kecamatan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus di kecamatan yaitu “Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kecamatan”.

Adapun Isu strategis merupakan hal yang tak terpisahkan dari potensi, permasalahan PD, isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Argomulyo, serta isu lingkungan dinamis yang relevan, dengan gambaran sebagai berikut :

Isu Strategis Kecamatan Argomulyo



Secara keseluruhan, peningkatan penyelenggaraan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan memerlukan pemahaman secara keseluruhan yang melibatkan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi atau kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat karena harapannya menjadi ujung tombak pelayanan publik yang prima dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

2.3.1. Review Terhadap RKPD

Reviu terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran. Sangat perlu mereviu RKPD dengan Analisis Kebutuhan Tahun 2027 karena berbagai pertimbangan dan kondisi serta kebijakan yang dinamis secara otomatis hasil Analisa kebutuhan tahun 2027 berbeda dengan RKPD tahun 2027.

Secara umum, hasil reviu terhadap RKPD Kecamatan Argomulyo belum sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini disebabkan karena anggaran 2027 dirasionalisasi dikarenakan masih Pemerintah Kota Salatiga target pendapatan masih belum tercapai. Terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD dan analisis kebutuhan masih banyak kekurangan anggaran. Terutama anggaran gaji dan tunjangan pegawai sementara hanya untuk 12 bulan. Diharapkan dengan berjalannya waktu pendapatan Pemerintah Kota Salatiga memenuhi target bahkan melebihi target sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Adapun reviu antara RENSTRA dan hasil analisa kebutuhan Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Review terhadap RKPD Tahun 2027

Rancangan RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja(output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)	(12)
					13.768.573.163					14.062.115.885	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100,00%	8.945.087.163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100,00 %	9.238.629.885	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00%				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 %		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,01%				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,01 %		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00 %	5.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	5.000.000	

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8.092.127.163	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 %	8.385.669.885	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Argomulyo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65 orang	7.843.467.158	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Argomulyo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65 orang	7.961.229.858	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	248.660.005	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	424.440.027	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100%	9.500.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	100 %	9.500.000	
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	2 dokumen	9.500.000	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	2 dokumen	9.500.000	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perangkat daerah			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi perangkat daerah		-	
	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket pengdaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket pengdaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		-	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah orang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah orang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 orang	-	

5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	273.870.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	273.870.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 paket	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 paket	20.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 paket	22.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 paket	22.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	40 paket	47.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	40 paket	47.000.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	50.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 unit	50.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 dokumen	9.270.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 dokumen	9.270.000	
	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	8.000.000	Sub Kegiatan Kunjungan Tamu	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	8.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Argomulyo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	17.600.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Argomulyo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	17.600.000	

6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			
	Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
	Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			Sub Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	278.590.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	278.590.000	
	Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2.500.000	Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	60.000.000	

			yang disediakan			dan Listrik		yang disediakan			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	216.090.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	216.090.000	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	286.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	286.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	50.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	58 unit	70.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	58 unit	70.000.000	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	7 unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	7 unit	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	6 unit	26.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara / direhabilitasi	6 unit	26.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	40.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kecamatan Argomulyo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	40.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Argomulyo	Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	85,00%	64.550.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Argomulyo	Prosentase peningkatan skor indeks kepuasan masyarakat	85 %	64.550.000	
1	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	9.550.000	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	9.550.000	

	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	9.550.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	9.550.000	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	100%	55.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	100 %	55.000.000	
	Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan	55.000.000	Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 laporan	55.000.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Argomulyo	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	100%	4.651.150.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Argomulyo	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangkel	100 %	4.651.150.000	
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Argomulyo	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang	100%	304.000.000	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Argomulyo	Prosentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas kegiatan pemberdayaan	100 %	304.000.000	
	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Argomulyo	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	10 laporan	304.000.000	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Argomulyo	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	10 laporan	304.000.000	

						kecamatan					
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Argomulyo	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	100%	4.347.150.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Argomulyo	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	100 %	4.347.150.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan	71.400.000	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan	71.400.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (TMMD)	Kecamatan Argomulyo	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 pokmas	185.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TMMD)	Kecamatan Argomulyo	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan	1 pokmas	185.000.000	
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan / dankel	Kecamatan Argomulyo	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan		4.090.750.000	Kegiatan pemberdayaan kelurahan / dankel	Kecamatan Argomulyo	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di kelurahan		4.090.750.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Argomulyo	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan		2.040.180.900	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Argomulyo	Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan	78 unit	2.040.180.900	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	6 pokmas	2.050.569.100	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	6 pokmas	2.050.569.100	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi	100%	35.406.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Argomulyo	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban	100 %	35.406.500	

	UMUM		pimpinan kecamatan			UMUM					
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Argomulyo	Prosentase terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan	100%	35.406.500	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Argomulyo	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 %	35.406.500	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	35.406.500	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	35.406.500	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Argomulyo	Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP	76%	72.379.500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Argomulyo	Prosentase wajib pajak yang membayar PBB P2	76 %	72.379.500	
1	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Argomulyo	Persentase tersedianya fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	76%	72.379.500	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Argomulyo	Prosentase penyampaian SPPT PBB pada WP	76 %	72.379.500	
	Sub Kegiatan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	2 dokumen	72.379.500	Sub Kegiatan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Argomulyo	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	2 dokumen	72.379.500	
JUMLAH					13.768.573.163					14.062.115.885	

2.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil telaah terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, usulan yang berkaitan dengan Kecamatan pada umumnya difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Usulan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

Usulan pembangunan sarana dan prasarana mencakup penyediaan, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas umum maupun fasilitas pendukung pelayanan masyarakat yang menjadi kebutuhan di wilayah Kecamatan Argomulyo. Sementara itu, usulan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan kelembagaan, pelatihan, peningkatan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil telaah menunjukkan bahwa usulan-usulan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, pelaksanaannya tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar perangkat daerah, kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah, ketersediaan anggaran, serta skala prioritas pembangunan. Oleh karena itu, Kecamatan Argomulyo berperan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyampaikan usulan tersebut.

Dengan demikian, Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Argomulyo, khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang dapat

mendukung peningkatan pelayanan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Argomulyo.

Adapun data usulan Pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut pada tabel 2.4

Tabel 2. 4 Data Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 01 RW 02 Promasan Kel. Kumpulrejo	Rehab Gedung Balai RW 02 Promasan			Pokir (Hartoko Budhiono, SE
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kenteng RT 01 RW 05 Tegalrejo	Tersedianya Pengadaan Tenda			Pokir (Saiful Mashudi)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 05 RW 04 Tegalrejo	Tersedianya Pengadaan Sound System			Pokir (Saiful Mashudi)
4	Program Pemberdayaan	RT 01 RW 10 Randuacir	Tersedianya Pengadaan Tratak, Sound System dan Kursi			Pokir (Saiful Mashudi)

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana					
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 02 RW 10 Randuacir	Tersedianya Pengadaan Tratak, Sound System, dan kursi			Pokir (Saiful Mashudi)
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 03 RW 10 Randuacir	Tersedianya Pengadaan Tratak, Sound System, dan kursi			Pokir (Untung Haryanto, SE)
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan :	RT 04 RW 10 Randuacir	Tersedianya Pengadaan Tratak, Sound System, dan kursi			Pokir (Untung Haryanto, SE)

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana					
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 05 RW 05 Kenteng Tegalrejo	Terbangunnya rehabilitasi Balai RW 05			Pokir (Heri Subroto, SE.,SH)
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 07 RW 04 Tegalrejo	Tersedianya Sarana dan Prasarana RT			Pokir (Heri Subroto, SE.,SH)
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 02 RW 03 Slumut Kumpulrejo	Terbangunnya Balai RW 03 Slumut			Pokir (Agus Warsito)

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Masjid Sabilul Falah Perum Argomulyo RT 04 RW 08 Randuacir	Tersedianya Pengadaan Kursi dan CCTV			Pokir (Hj. Riawan Woro, SE.,MM)
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 06 RW 04 Tegalrejo	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana RT			Pokir (Heri Subroto, SE.,SH)
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 03 RW 05 Jagalan Cebongan	Terbangunnya Balai RW 03 Cebongan			Pokir (Saiful Mashudi)
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	RW 05 Kenteng Tegalrejo	Tersedianya Pengadaan Sound System dan Kursi			Pokir (Andreas Yosep Kristianto)

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana					
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Slumut RW 03 Kumpulrejo	Tersedianya Sound System dan Kursi			Pokir (Anderas Yosep Kristianto)
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jurang Gunting RT 02 RW 05	Tersedianya Pengadaan Tenda Tratak dan Panggung			Pokir (Saiful Mashudi)
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan	RT 01 RW 03 Isep- isep Cebongan	Terbangunnya Balai RW 03 Cebongan			Pokir (Saiful Mashudi)

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Sarana dan Prasarana					
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Kumpulrejo	Pelatihan Pengoperasian Komputer			Pokir (Hartoko Budiono, SE)
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Kumpulrejo	Pelatihan pembuatan Buket dan Hantaran Bagi Anggota PKK Kumpulrejo			Pokir (Hartoko Budiono, SE)
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Kumpulrejo	Pelatihan Memasak Kuliner Tradisional untuk PKK Kel. Kumpulrejo			Pokir (Hartoko Budiono, SE)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan public sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah kelurahan, Lembaga, organisasi maupun masyarakat. Oleh sebab itu untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Argomulyo melalui Musrenbangkel dan Musrenbang Kecamatan sehingga hasil dari dua kegiatan berupa sarana dan prasarana fisik yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecaamatan Argomulyo secara langsung membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas/OPD terkait.

Program dan kegiatan masyarakat yang hasilnya usulan aspirasi masyarakat ke pemangku wilayah yang mana telah dilakukan survey lapangan untuk menampung aspirasi tersebut. Dari banyaknya usulan akan diambil sebagian untuk skala prioritas. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat belum dapat dituangkan dalam penyusunan Renja 2027 dikarenakan pada saat ini di wilayah/kelurahan belum melaksanakan pra musrenbangkel di tingkat RW.

Adapun usulan masyarakat dapat tertuang dalam tabel 2.4

Tabel 2. 5 Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Wilayah Tahun 2027

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
I	KELURAHAN LEDOK					
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 05 RW 10	Terbangunnya Tembok Dinding Pengamanan/Pembatas Lingkungan	59	m	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RW 09	Terbangunnya Renovasi Balai RW 09 Perumahan Argomas Timur	1	paket	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RW 14	Terbangunnya pembuatan Kanopi TBM dan Kanopi Lanjutan Balai RW 14	110	M ²	

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 05 RW 01	Terbangunnya - Saluran Air dan Penutup Saluran Jl. Argoyuwono - Penutup Saluran Air Jl. Argowasis - Penutup Saluran Air Jl. Argowasis I (SK Jalan No. 053)	1	paket	
II KELURAHAN KUMPULREJO						
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RW 09 Ngemplak	Terbangunnya Pelebaran Badan Jalan Ngemplak RT 02 RW 09 Ngemplak (arah pendingan)	680	m	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RW 02 Promasan	Terbangunnya Rehab Saluran Air/Drainase Jl. Kyai Romas 1 s.d Jl. Kyai A. Bisri RW 02 Promasan	128	m	
3	Program Pemberdayaan	RW 06 Tetep Wates	Terbangunnya Rehab Saluran Air/Draibase (uditch + penutup)	156	m	

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana		Jl. Tanggung Sari RW 06 Tetep Wates			
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RW 01 Randuares	Terbangunnya Rehab Saluran Air Jl. Amarta	950	m	
III KELURAHAN TEGALREJO						
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Karang Kepoh I, II dan Jl. Sumur Bandung	Terbangunnya Rehabilitasi Saluran Drainase dan Penutup Saluran Drainase	295	M	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jl. Tirtoning	Terbangunnya Rehabilitasi Saluran Drainase	120	M	

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana					
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Bulu Sari Raya	Terbangunnya Rehabilitasi Saluran Drainase	200	M	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Duku RT 02 RW 04	Terbangunnya Talud	20	M	
IV KELURAHAN NOBOREJO						
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan	Jl. Mawar Noborejo	Terbangunnya Talud Penahan Tanah Pelebaran Jl. Mawar RT 01 RW 02 (SK Jalan No. 0499)	267 m1 x 347 m ³		

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Sarana dan Prasarana					
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RW 10	Terbangunannya Saluran Jl. Salam (SK Jalan No. 0698) dan Jl. Sadwea (SK Jalan 0696)	181 m ¹ x 702 m		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RW 05	Terbangunnya Sudetan saluran Air Jakan Merfbabu Noborejo arah Kali Blondo	193	M ¹	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Melati	Terpeliharanya Jalan Melati Noborejo (SK Jalan No. 0505)	941 x 5,5	M	
V	KELURAHAN CEBONGAN					

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RT 04 RW 04	Terbangunnya Saluran Pondok Joko Tingkir	300	M	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Cebongan	Terbangunnya Rehab Sedang Gedung Pertemuan Kantor Kelurahan Cebongan	1	Unit	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Cebongan	Terbangunnya Gedung Kantor LPMK dan PKK	1	Unit	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	RW 04	Pembangunan Trotoar dan Saluran Jl. Seokarno Hatta	1	Unit	

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana					
VI KELURAHAN RANDUACIR						
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jl. Gambirsari RW 10	Terbangunnya Pelebaran Jalan	1066	M	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	- Jl. Gambirsari RW 10 - Jl. Tanjungsari RW 03 - Jl. Sekarsari RW 07	Terbangunnya Saluran	818	M	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan :	Perumahan Prajamulia RW 09	Terbangunnya Pembangunan Balai RW	1	paket	

No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana					
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana	RW 02	Terbangunnya Pembangunan Jalan Aspal	500	m	

2.6. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Argomulyo terus mengembangkan berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan akses layanan, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penguatan partisipasi masyarakat. Inovasi tersebut dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi dengan kelurahan maupun perangkat daerah terkait.

Berbagai inovasi yang dikembangkan meliputi penyederhanaan alur pelayanan administrasi, pemanfaatan media digital sebagai sarana penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat, peningkatan koordinasi melalui forum komunikasi lintas sektor, serta optimalisasi pelayanan terpadu yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Kecamatan Argomulyo mendorong peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan budaya pelayanan prima agar masyarakat memperoleh pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan. Adapun inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. JEMPOLQR (Jemput Pelayanan Online *Via Quick Response*) pada Kelurahan Cebongan.

Merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai syarat permohonan surat pengantar dan surat keterangan di Kelurahan Cebongan. Layanan ini memanfaatkan *Quick Response* sebagai pusat tautan layanan. Inovasi ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Penerapan JEMPOLQR memungkinkan masyarakat mengakses informasi pelayanan kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat meminimalkan kunjungan tatap muka yang tidak perlu, mempercepat waktu pelayanan di loket, memastikan keterbukaan informasi persyaratan, serta meningkatkan kepuasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik.

2. SINERGI (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berbasis Digitalisasi Guna Supervisi) pada Kelurahan Noborejo.

Keberhasilan suatu organisasi ASN dituntut untuk memiliki aparatur yang profesional, berintegritas serta adaptif (*agile*) terhadap ekosistem digital agar mampu menghadapi tantangan modernisasi birokrasi dan untuk merubah mindset aparatur dari rekapitulasi data secara parsial menjadi kolaboratif dan transparan dalam tata kelola administrasi. SINERGI merupakan kolaborasi inovatif dalam pemanfaatan teknologi informasi guna memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rutin dan pengumpulan bukti dukung secara real-time, sehingga pimpinan kelurahan dapat melakukan supervisi dan memantau capaian kinerja dari mana saja. Pelaksanaan SINERGI berjalan efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan Visi Kota Salatiga 2025-2029, prinsip *good governance*, serta mendukung agenda prioritas ASTACITA terkait digitalisasi administrasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3. LEDOK GAMPANG (Gerakan Akses Mudah Publikasi Informasi Administrasi dan Pelayanan Bagi Warga) pada Kelurahan Ledok.

Keberhasilan suatu organisasi perangkat daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Inovasi ini dihadirkan sebagai solusi atas rendahnya nilai survey kepuasan masyarakat pada indikator produk layanan (informasi). Dengan mengubah pola pelayanan informasi dari model konvensional (tatap muka) menjadi digitalisasi terintegrasi melalui tiga kanal yaitu *Website* resmi, *WhatsApp Business*, dan Media Sosial.

LEDOK GAMPANG merupakan kolaborasi dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang adaptif, transparan, akuntabel sehingga masyarakat dapat mengakses prosedur, persyaratan, alur, serta jadwal pelayanan secara mandiri, cepat, dan tanpa batas ruang dan waktu. Pelaksanaan inovasi ini berjalan efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan Visi Kota Salatiga 202-2029, prinsip good governance, serta mendukung agenda prioritas ASTACITA dalam penguatan digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4. Digitalisasi Database Kearsipan untuk Peningkatan Pengelolaan Arsip di Kecamatan Argomulyo

Berlatar belakang pengelolaan arsip di Kecamatan Argomulyo yang masih terkendala karena penumpukan arsip-arsip lama yang tidak tertata sesuai klarifikasi arsip, maka dilakukan penataan arsip sesuai dengan klasifikasi arsip dalam suatu database berikut soft file arsip agar data kearsipan tersimpan dengan baik. Setelah tertata dengan baik sesuai dengan klasifikasi kearsipan maka akan

dilakukan proses pada tahap selanjutnya yaitu penyusutan/pemusnahan arsip yang sudah melewati masa retensi sehingga arsip yang berbentuk fisik akan berkurang dan ruang arsip dapat digunakan untuk menyimpan arsip baru. Di sisi lain penyusutan ini akan dilakukan audit kearsipan di Kecamatan Argomulyo oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Kecamatan Argomulyo berupaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi yang dikembangkan juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ARGOMULYO

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, antara lain bertujuan untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk,

kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pembentukan Kecamatan, menurut Peraturan Pemerintah ini, dilakukan melalui: a. pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai masalah Kelurahan, dari pembentukan hingga kedudukan Kelurahan dan tugas Lurah, termasuk juga masalah pendanaan, dan pakaian dinas Camat dan Lurah.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, mewajibkan semua Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kedua peraturan tersebut.

Dalam rangka penerapan pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring serta evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik, telah di terbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Maka sejak tanggal 1 Januari 2021 Pemerintah Daerah harus menggunakan aplikasi SIPD baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, program dan kegiatan mengalami banyak perubahan. Dalam

pelaksanaannya perlu waktu untuk penyesuaian, karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana.

Kebijakan Nasional yang didukung oleh tugas dan fungsi kecamatan adalah pada Prioritas Nasional yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Tabel 3. 1 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
1.	Membangun dari desa dan dari bawah pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Ekonomi Kreatif Kecamatan Argomulyo
2	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	- Mengadakan koordinasi dengan warga mengenai hak dan kewajiban politik dalam pendidikan politik warga - Optimalisasi musrenbang kecamatan agar lebih transparan dan inklusif - Melibatkan kelompok rentan (Perempuan, difabel, pemuda) dalam proses perencanaan - Pembinaan dan koordinasi dengan Polsek, Koramil serta tokoh masyarakat dalam penguatan penegakan hukum berbasis masyarakat - Pakta Integritas seluruh ASN Kecamatan, - Penguatan peran pemuda, masyarakat dan organisasi sebagai tempat untuk pembinaan kelompok masyarakat anti narkoba

3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 salah satunya adalah Peningkatan tata kelola pemerintahan

yang lebih adaptif dan kolaboratif dan ambil yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat

Tabel 3. 2 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, Perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan <i>sport center</i>)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Ekonomi Kreatif Kecamatan Argomulyo

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2025-2029. Penentuan tujuan dalam Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu kepada Misi ke-3 RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Tujuan Pembangunan daerah Kota Salatiga berdasarkan RPJMD adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital.

Adapun tujuan jangka menengah Kecamatan Argomulyo Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan”

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Pembangunan daerah Kota Salatiga berdasarkan RPJMD adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima.”

Sedangkan sasaran jangka menengah Kecamatan Argomulyo tahun 2025-2029 adalah

1. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintahan kecamatan

2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pemerintah kecamatan

Penjabaran tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Argomulyo adalah :

1. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
2. Mengelola organisasi secara sistemik;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima;
4. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan memudahkan para pemangku kepentingan untuk menghadapi perubahan masa depan;
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
6. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek.

Sedangkan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dalam pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang terpadu, cepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang handal di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Tersusun dan terciptanya system komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat
5. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
6. Meningkatnya kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kecamatan		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan dan persentase capaian akuntabilitas pemerintah kecamatan	%		77	80
2		Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintahan kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintahan	Rata-rata Capaian Kinerja Tingkat Pembangunan Dalam 1 Tahun, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangkel, Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, Persentase Penyampaian SPPT PBB pada Wajib Pajak.	%		77	80
		Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kecamatan	Persentase Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata Capaian Kinerja Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%		77	80

Kecamatan Argomulyo berkomitmen untuk mendukung Prioritas Pembangunan Kota dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan tugas kewilayahan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sosial, ekonomi dan partisipasi masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat wilayah, Kecamatan Argomulyo berperan penting dalam memastikan bahwa program pemberdayaan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota dapat tersampaikan dan diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat.

Kecamatan Argomulyo melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, antara lain dengan memfasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat seperti LPMK, RT/RW, PKK dan Karang Taruna agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan. Serta mendukung pelaksanaan program pelatihan ketrampilan, pemberdayaan ekonomi local, serta kegiatan peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat yang diinisiasi oleh perangkat daerah teknis maupun oleh Pemerintah Kota.

Kecamatan Argomulyo mendorong partisipasi masyarakat melalui forum-forum pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, guna memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan kota. Kecamatan Argomulyo juga melakukan pendampingan terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas, termasuk gotong royong, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pelibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban, kendsihan dan ketahanan wilayah.

Melalui peran koordinatif, fasilitatif dan pembinaan yang dilakukan, Kecamatan Argomulyo berkontribusi secara langsung terhadap prioritas pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan Pemerintah Kota. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat sebagai subyek pembangunan

sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, partisipatif dan berdaya saing. Kecamatan Argomulyo secara tidak langsung mendukung Program Unggulan/Prioritas Wali Kota, dengan program sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Dukungan Program dan Kegiatan Daerah Terhadap Proritas dan Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	Program SI AKAS (Salatiga, Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap)	- Memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, catatan sipil dan Perijinan UMKM agar tuntas di tingkat kecamatan - Membangun sistem pengaduan pelayanan public terpadu sampai tingkat RT (Rukun Tetangga) melalui aplikasi android dan memberikan jaminan respon cepat dalam hari yang sama	1. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM 2. Pengembangan layanan digital
2	Program SARI (Salatiga Lestari)	- Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kelurahan/kecamatan	Pembentukan Pokja Pengelolaan Sampah di wilayah
3.	Program SOS (Salatiga On System)	- Program SOS bertujuan membangun infrastruktur jaringan online terpadu untuk pengawasan infrastruktur, lingkungan hidup dan mobilitas masyarakat yang berpusat pada <i>Command Center</i> tingkat kecamatan dan kota	Pelatihan warga untuk memanfaatkan aplikasi dan hotline kedaruratan dan publikasi data realtime jika terjadi bencana alam

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan kerangka strategis yang menunjukkan tujuan, prioritas, dan fokus utama pembangunan mendasarkan pada target yang ingin dicapai dalam misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Kecamatan Argomulyo Tahun 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025 adalah “

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam

menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Tabel 3. 5 Teknis Merumuskan Arah Kebijakan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima	Meningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan, dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan kualitas pelayanan, administrasi tingkat kecamatan dan kelurahan, mengembangkan kerjasama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan perangkat daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ARGOMULYO

Penyusunan rencana kerja yang matang dan realistis serta pengelolaan pendanaan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi, serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Kecamatan Argomulyo

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan kewilayahan.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebanyak 5 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 secara total sebesar Rp. 14.062.115.885,- (empat belas milyar enam puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Salatiga.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan rumusan program

Dalam Upaya mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kecamatan Argomulyo merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Penyusunan struktur program berdasarkan analisis kebutuhan wilayah, evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta identifikasi isu strategis. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 berdasarkan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, baik melalui administrasi, koordinasi maupun fasilitasi teknis dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan memastikan seluruh layanan public di tingkat kecamatan terlaksana secara efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Kepatuhan terhadap NSPK untuk mejamin prosedur pelayanan sesuai regulasi, Pemenuhan SPM sektor administrasi agar layanan dasar masyarakat terpenuhi agar kebutuhan masyarakat akan layanan public lebih cepat, akurat dan transparan serta evaluasi capaian kinerja sebelumnya termasuk identifikasi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan public.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini bertujuan mengembangkan kapasitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat ekonomi dan sosial. Hal ini karena tingginya kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial serta memperluas akses layanan dasar dan memperkuat peran lembaga kemasyarakatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan kecamatan berjalan efektif, efisiensi dan akuntabel yang mencakup koordinasi pemerintahan dan fasilitasi pelayanan public di seluruh sektor dengan melakukan koordinasi pimpinan melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan tanah pertanian dan pemenuhan kewajiban membayar pajak PBB P2 secara tepat, akuntabel dan berkelanjutan.

b. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 terdiri dari :

- Program : 5 Program
- Kegiatan : 14 Kegiatan
- Sub Kegiatan : 31 Sub Kegiatan

Rencana Kerja untuk total kebutuhan dana/pagu indikatif yang menurut sumber pendanaanya

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Argomulyo Tahun 2027

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3
7					Urusan Unsur Kewilayahan	
7	01				Bidang Urusan Kecamatan	14.062.115.885
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.238.629.885
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.385.669.885
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.961.229.858
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	424.440.027
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.500.000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.500.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	-
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.870.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.000.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.270.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	17.600.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.590.000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik	60.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	-
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.090.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.000.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.000.000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	64.550.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.550.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.550.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit KerjanPerangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	55.000.000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.000.000
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.651.150.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	304.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	304.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.347.150.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71.400.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TMMD)	185.000.000
					Dakel	4.090.750.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.406.500

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.406.500
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.406.500
7	01	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.379.500
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.379.500
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa	72.379.500

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yabg disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan seperti tertuang dalam aplikasi SIPD Tahun 2027 sebagaimana terlampir

4.2. Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Kebijakan Tematik

Dukungan program dan kegiatan Kecamatan Argomulyo terhadap kebijakan tematik. Kecamatan Argomulyo memiliki peran strategis dakam mengimplementasikan kebijakan tematik pemerintah daerah dan nasional melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang terencana. Adapun factor pertimbangan

- Kesesuaian program yang ditetapkan pemerintah daerah.
- Kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.
- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- Pemenuhan SPM dan NSPK.
- Kontribusi terhadap pencapaian SDGs

Tabel 4. 2 Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Kebijakan Tematik

No	Jenis Kebijakan Tematik	Program	Aktivitas
1.	Layanan Publik	Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 2. Fasilitasi Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat 3. Penguatan Ekonomi Lokal dan UMKM 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
3.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi rapat koordinasi lintas sektor dalam forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan.
4.	Pengelolaan tanah pertanian produktif dan pembayaran PBB P2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Kewajiban kelurahan dalam memetakan, mengelola dan mendayagunakan tanah pertanian secara produktif 2. Memfasilitasi pembayaran Pajak PBB P2 sesuai peraturan perundang-undangan 3. Optimalisasi penggunaan tanah pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan Argomulyo selama periode pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas difokuskan pada penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, pelayanan administrasi kepada masyarakat, pembinaan pemerintahan kelurahan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Argomulyo.

Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan Kecamatan Argomulyo menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari terselenggaranya pelayanan administrasi pemerintahan secara efektif, meningkatnya koordinasi dengan perangkat daerah, kelurahan, serta instansi terkait, dan terlaksananya pembinaan serta pengawasan terhadap kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi pembangunan wilayah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala atau tantangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Namun kendala tersebut diupayakan penyelesaian melalui peningkatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kecamatan Argomulyo akan terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong

partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mengoptimalkan pembinaan kelurahan guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah dan terwujudnya pelayanan yang profesional, akuntabel, efektif.

Target kinerja yang disajikan meliputi Indikator Kinerja Utama Tahun 2027. Penetapan target tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara bertahap sesuai tahapan pada Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Kecamatan Argomulyo pada tahun 2027.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Argomulyo pada Tahun 2025 berbeda dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan pada Tahun 2027. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian dokumen perencanaan yang tertuang pada Renstra Tahun 2025-2029.

Dengan adanya perubahan tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 karena memiliki definisi operasional, rumusan indikator, target maupaun metode pengukuran yang berbeda. Oleh karena itu evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang berlaku pada masing-masing tahun pelaporan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Argomulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Argomulyo

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025	Target 2027
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027					
1.	Persentase Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan	%	-	-	77
2.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	-	-	77
3.	Persentase Capaian Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	%	-	-	77
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025					

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025	Target 2027
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,56	105,30	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60,76	99,52	-
3.	Persentase realisasi usulan dalam hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Argomulyo	%	72,75	110,23	-
4	Persentase PKK Aktif	%	99,70	166,17	-

Berdasarkan Tabel. 5.1, target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Argomulyo Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan hasil evaluasi capain kinerja Tahun 2025.

Perubahan Indikator Kinerja Utama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengukuran kinerja Kecamatan Argomulyo sehingga lebih mencerminkan efektifitas pelaksanaan tugas. Selanjutnya Kecamatan Argomulyo akan terus melakukan penyelelarasan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program pelaporan kinerja agar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang berlaku.

5.2. Indikator Kinerja Kunci

Kecamatan Argomulyo sebagai perangkat daerah kewilayahan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara khusus ditetapkan untuk mengukur pencapaian tujuan strategis kecamatan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kewenangan kecamatan yang bersifat koordinatif, faslitatif, dan administrative sehingga Sebagian besar indikator kinerja strategis berada pada kewenangan perangkat daerah teknis di tingkat kota.

Ketiadaan IKK pada tingkat kecamatan dipengaruhi oleh belum tersedianya standar indikator kinerja strategis yang relevan dengan fungsi kecamatan serta masih terbatasnya regulasi yang mengatur penyusunan indikator strategis pada perangkat daerah kewilayahan. Namun demikian, Kecamatan

Argomulyo tetap melaksanakan pengukuran kinerja melalui indikator pelayanan yang tersedia yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, koordinasi pembangunan wilayah serta fasilitasi penyelenggaraan kertetiban umum dan pelayanan masyarakat. Kecamatan Argomulyo tetap melakukan pengukuran kinerja melalui indikator program dan kegiatan yang relevan, terutama terkait pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Tabel 5. 2 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030	Ket
	TIDAK ADA						

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan Substansi

Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun Anggaran 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman Kecamatan Argomulyo dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama satu tahun anggaran. Penyusunan Rencana Kerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Argomulyo, RKPD serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, kebutuhan pelayanan masyarakat, dan aspirasi yang berkembang melalui perencanaan pembangunan.

Secara substansial, Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta fasilitasi pembangunan di wilayah kecamatan. Seluruh program dan kegiatan dirancang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah dan target pembangunan daerah.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Argomulyo, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Argomulyo menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan kecamatan dalam menyusun dan

melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun anggaran 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara konsisten dengan mengacu pada target kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif, serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD, Renstra Kecamatan, dan dokumen perencanaan lainnya yang berlaku.
3. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan harus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada hasil dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Kecamatan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan.
5. Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo didukung dengan pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.
6. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas pembangunan daerah, kondisi yang bersifat strategis, keadaan darurat, atau perubahan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan rencana kerja dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Setiap pelaksana program dan kegiatan bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja, ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas keluaran, serta tertib administrasi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan berpedoman pada kaidah pelaksanaan tersebut, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

6.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Kecamatan Argomulyo telah sesuai dengan arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, target, dan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah serta mendukung pencapaian target pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pengendalian dilakukan secara berkala melalui pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, realisasi fisik dan keuangan, serta identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil pengendalian menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan, percepatan pelaksanaan kegiatan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mengukur efektivitas, efisiensi, manfaat, serta dampak pelaksanaan

program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan kecamatan. Evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, program, kegiatan, dan penyusunan dokumen perencanaan pada periode berikutnya.

Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi, Kecamatan Argomulyo melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait, kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah. Proses tersebut dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang akurat, pelaporan secara berkala, monitoring lapangan, rapat koordinasi, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.

Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo Tahun 2027 juga menjadi instrumen pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan, sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah, dinamika pembangunan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun kemampuan keuangan daerah, maka penyesuaian terhadap rencana kerja dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terarah, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu

terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Daerah.



WALIKOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN